

LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT



TRIWULAN III TAHUN 2018

Jakarta Barat, 01 November 2018

Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

Di

Jakarta Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini saya sampaikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Jakarta Barat Triwulan III periode Juli, Agustus dan September 2018 dengan harapan laporan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan untuk ditindak lanjuti.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan.

Wassalam,

Koordinator Bidang Pengawasan



Dr. H. Amam Fakhur, S.H., M.H

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
PERIODE TRIWULAN III 2018**

I. DASAR PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Periode Juli 2018 - September 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: W9-A2/4949/PS.00/10/2018, tanggal 18 Oktober 2018.

Pelaksanaan Pengawasan ini dilaksanakan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang, yaitu:

1. Dr. H. Amam Fakhrrur, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagai Koordinator Hakim Pengawas.
2. Drs. H. Ali Mas'ad, Bidang Resgiter Perkara dan Posbakum.
3. Drs. Mulawarman, SH., MH., Bidang Administrasi Keuangan Dipa dan Kepegawaian.
4. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy, Bidang Keuangan Perkara.
5. Drs. H. Mahdy Usman, SH, Bidang Administrasi Pelaporan Perkara.
6. Dra. Hj. Absari, MH, Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik.
7. Drs. H. Abdul Hadil, MHI, Bidang IT, Minutasi dan Kearsipan Perkara.
8. Dra. Hj. Neliati, S.H. Bidang Administrasi Upaya Hukum Penyitaan dan Eksekusi
9. Drs. H. MHD. Nasir, S., S.H., M.H. Bidang Administrasi Persuratan, Perlengkapan dan Perpustakaan Kantor
10. Dra. Nurhayati, MH, Bidang Administrasi Persidangan dan Mediasi.
11. Praptiningsih, SH.,MH, Bidang Penerimaan Perkara dan Akte Cerai.
12. Dr. Mustar, M.H. Bidang SIPP.

II. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

A. Drs. H. Ali Mas'ad, Pengawas Bidang Resgiter Perkara dan Posbakum.

TEMUAN/MASALAH		SEHARUSNYA
1. Register Itsbat Rukyah Hilal.	a. Register Itsbat Rukyah Hilal, belum dibuat.	a) Register Itsbat Rukyah Hilal (RI-PA 13), harus dibuat.
2. Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.	b. Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah, belum dibuat.	b) Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RI-PA 14), harus dibuat.
3. Register Mediator.	c. Register Mediator, belum dibuat.	c) Register Mediator (RI-PA 16), harus dibuat.

<p>a. Berkas Perkara No. 0086/Pdt.P/2018/PA JB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Tanggal Penetapan Majelis Hakim (PMH) tertulis : 10-01-2018. o Susunan Majelis tertulis : Drs.H.Rusman Mallapi, MH. Drs. H. Ali Mas'ad Dra. Nurhayati, M.H. Hj. Nisrin, SH., MH. o Tanggal PHS tertulis : 11-01-2018. o Tanggal Sidang Pertama tertulis : 24-01-2018. o Tanggal Sidang tunda tertulis : 31-01-2018. o Sidang Putus tertulis tanggal 31-01-2018. o Kolom BHT, tidak diisi (disetrip). 	<ul style="list-style-type: none"> o Tanggal Penetapan Majelis Hakim (PMH) seharusnya tertulis : 04-04-2018. o Susunan Majelis Hakim seharusnya tertulis : Drs. Mahdy Usnam, SH. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy Praptiningsih, SH., MH. o Tanggal PHS seharusnya tertulis : 05-04-2018. o Tanggal Sidang Pertama seharusnya tertulis : 25-04-2018. o Seharusnya tidak ada sidang tunda. o Sidang Putus seharusnya tertulis tanggal : 25-04-2018. o Kolom BHT, harus diisi untuk mengetahui batas waktu telah berkekuatan hukum tetap.
<p>b. Berkas Perkara No. 0084/Pdt.P/2018/PA JB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Susunan Majelis tertulis : Drs.H. Ubaidillah, M. Sy. Dra. Hj. Neliati, SH. Drs.H.Mhd. Nasir S, MH. o Tanggal sidang pertama tertulis : 19-04-2018. o Tanggal sidang tunda tertulis : 26-04-2018. o Tanggal Putus tertulis : 26-04-2018. o Kolom BHT, tidak diisi (disetrip). 	<ul style="list-style-type: none"> o Susunan Majelis seharusnya tertulis : Drs. Mulawarman, M.H. Dra. Hj. Neliati, SH. Drs.H.Mhd. Nasir S, MH. o Seharusnya tertulis : 18-04-2018. o Seharusnya tertulis : Tanggal : 02-05-2018. o Seharusnya tertulis tanggal : 02-05-2018. o Kolom BHT, harus diisi untuk mengetahui batas waktu telah berkekuatan hukum tetap.
<p>➤ Berkas Perkara No. 1149/Pdt.G/2018/PA JB.</p> <p>➤ Berkas Perkara No. 1157/Pdt.G/2018/PA JB.</p> <p>➤ 1156/Pdt.G/2018/PA JB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Amar Putusan dan amar Penetapan Ikrar Talak, ditulis dengan tinta remang-remang dan sulit dibaca. o Tidak diisi tanggal BHT. 	<ul style="list-style-type: none"> o Seharusnya ditulis dengan tinta yang jelas dibaca. o Kolom BHT, harus diisi untuk mengetahui batas waktu telah berkekuatan hukum tetap.

B. Dra. Hj. Absari, MH, Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik.

No	TEMUAN	SEHARUSNYA
1	<p>Pembinaan Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada jadwal Rapat Koordinasi, jadwal Pembinaan dan jadwal Kerja Bakti secara tertulis. - Namun sudah ada undangan dan notulen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan jadwal yang jelas tentang Rapat Koordinasi, Pembinaan dan kerja bakti.
2	<p>Tertib Perkantoran dan Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat masuk dan surat keluar sudah di bukukan dan setiap bulan di tutup oleh petugas. - Belanja bulan sudah sesuai dengan kebutuhan. - Banner/spanduk sudah di buat tapi masih belum lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah di lengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku.
3	<p>Program Kerja dan Job.Description Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program kerja sudah ada dan sudah di laksanakan. - Job Description masing-masing pegawai sudah ada 	
4	<p>Penataan Meja Informasi dan Petugas-petugasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja informasi sudah di tata dengan baik. - SK. Petugasnya sudah di buat dan sudah di laksanakan sesuai SK - Belum ada sarana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat. 	
5	<p>Kecepatan dan Ketepatan pelayanan baik dalam permintaan informasi perkara, program kerja, fatwa dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara yang sudah di putus instrumen PBT belum di serahkan oleh Ketua Majelis kepada JSP contoh 1151/Pdt.G/2018 dan 1839/Pdt.G/2018/PA.JB - Berkas perkara sudah turun ke meja 3 namun PBT belum di serahkan oleh JSP contohnya Nomor . 408/Pdt.G/2018 dan 2063/Pdt.G/2018. 	
6	<p>Penanganan dan tindak lanjut pelaporan dari masyarakat:</p> <p>Laporan dari masyarakat telah di lakukan tindak lanjutnya</p>	<p>Agar segera di pikirkan sarana untuk mengukur kepuasan masyarakat.</p>

C. Drs. H. Abdul Hadi, MHI, Bidang IT, Minutasi dan Kearsipan Perkara.

URAIAN		KETERANGAN
Pemberkasan dan Minutasi		
1	Penyelesaian perkara sejak diterima, diputus, dan diminutasi harus selesai 5 bulan.	ada 34 perkara yang lebih dari 5 bulan
2	Perkara yang belum selesai dalam waktu 5 bulan, harus dilaporkan ke PTA dan Mahkamah Agung.	sudah dilaporkan
3	Pembundelan berkas perkara disusun menurut kelompok/kronologis.	√
4	Masing-masing kelompok disusun secara kronologis dan di lem secara rapi	√
5	Keseluruhannya disatukan dalam satu bundel, dijahit dan diberi lak stempel Ketepatan waktu minutasi	√
KEARSIPAN PERKARA		
A. Penyimpanan dan Pengklasifikasian Berkas		
1	Penyimpanan berkas perkara yang masih berjalan berada pada panitera perkara (panitera muda gugatan / permohonan).	√
2	Arsip berkas perkara disimpan pada panitera muda hukum.	√
3	Arsip diklasifikasi sesuai dengan jenis perkara.	√
4	Penyimpanan arsip di dalam box diberi catatan tentang tahun, nomor urut arsip, dan daftar/kartu isi arsip.	√
5	Penyimpanan dalam lemari/rak diberi daftar isi rak (DIR) dan daftar isi lemara (DIL).	√
6	Ketertiban penyimpanan berkas minutasi dan arsip laporan perkara	√
7	Ketertiban penata usahaan arsip perkara	√
8	Ketepatan waktu pelaporan perkara	√
9	Ketertiban pembuatan laporan perkara sesuai dengan Pola Bindalmin.	√
B. Berkas yang Menarik Perhatian Umum dan mempunyai nilai sejarah.		
1	Berkas yang menarik perhatian umum (diserahkan ke arsip nasional/ daerah).	belum ada ada penelitian/penilaian berkas yang menarik perhatian umum
2	Berkas yang mempunyai nilai sejarah diserahkan kearsip nasional/ daerah).	belum ada pengiriman berkas kearsipan nasional/daerah
3	Penyerahan berkas kearsip nasional/daerah dicatat secara lengkap dan dibuat berita acara penyerahan.	belum ada pengiriman berkas kearsipan nasional/daerah
C. Penghapusan Arsip		
1	Penghapusan arsip dilakukan setelah usia arsip minimal 30 tahun dengan membentuk panitia berdasarkan SK Ketua Pengadilan, kemudian berita acara dan daftar isi arsip, disimpan dalam rak/lemari sebagai pengganti arsip yang dihapuskan.	belum ada penghapusan arsip
Bidang SIPP		
Ketepatan waktu pengisian		
1. bantuan delegasi keluar belum dilaksanakan		1442 delegasi
2. bantuan delegasi masuk belum dilaksanakan		152 delegasi
3. Perkara yang belum PHS.		2 perkara
4. Sisa panjar yang belum dikembalikan Gugatan		1874 perkara
5. Sisa panjar yang belum dikembalikan Permohonan		380 perkara

6. Sisa panjar yang belum dikembalikan banding	10 perkara
Kelengkapan menu yang di isi	
Operasional oleh masing-masing user	

D. Dra. Nurhayati, M.H., Bidang Administrasi Perkara dan mediasi.

NO.	TEMUAN	SEHARUSNYA
1.	Perkara nomor 960/Pdt.G/2018, putus tanggal 20 Agustus 2018 tapi BAP untuk sidang tanggal 4 Juni 2018 dan 9 Juli 2018 belum di Tanda tangan oleh Ketua Majelis	Berita Acara Persidangan seharusnya sudah selesai sebelum hari sidang berikutnya.
2.	Perkara nomor 960/Pdt.G/2018, perkaranya putus verstek tapi sidangnya sampai enam kali sidang ;	Idealnya putusan verstek hanya 2 kali sidang sudah bisa diputus ;
3.	Perkara nomor 2700/Pdt.G/2017,Relaas Panggilan untuk T untuk persidangan tanggal sidang tanggal 23 Januari 2018 pada relas panggilan tidak ada tanggal Pemanggilan dan tidak ada BAP di kolom keterangan pemanggilan	Seharusnya tercantum tanggal relas panggilan spy diketahui kapan dipanggil dan BAP diisi spy diketahui apakah bertemu atau tidak dengan Pemohon atau Termohon ;
4.	Perkara nomor 2700/Pdt.G/2018, putus tanggal 13 - 02 - 2018 tp belum ada pemberitahuan isi putusan	Seharusnya Pemberitahuan secepatnya disampaikan kepada yang bersangkutan
5.	Perkara nomor 2700/Pdt.G/2017,Relaas Panggilan untuk T untuk persidangan tanggal sidang tanggal 23 Januari 2018 tapi belum dipanggil lkrar	Harusnya P sudah di panggil untuk ikrar talak karena perkaranya putus sejak 13 Februari 2018
6.	Masih ditemukan surat bukti yang belum diberi keterangan dan diparaf oleh Ketua Majelis, seperti perkara Nomor: 2700/Pdt.P/2018,	Surat bukti harus ditulis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis.
7.	Masih ditemukan surat bukti hanya diparaf oleh Ketua Majelis, seperti perkara Nomor: 119/Pdt.P/2017,	Surat bukti harus ditulis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis.
8.	Perkara nomor 511/Pdt.G/2017, susunan berkas tidak kronologis	Harusnya bukti Surat bukti disusun kronologis yaitu diletakkan sebelum keterangan saksi ;.
9.	Jurusita pengganti dalam menyerahkan relaas panggilan kepada PP ketika perkara akan disidangkan bahkan sering ditemukan ketika perkara disidangkan relaas panggilan T belum ada, hal ini akan memperlambat jalanya persidangan seperti perkara nomor 1659/Pdt.g/2018/PA.JB;	Seharusny panggilan diserahkan paling lambat sehari sebelum perkara disidangkan, sehingga tidak mengganggu jalannya sidang

10	Mediator kurang profesional dalam memediasi para pihak .	Untuk cerai talak walaupun tidak terjadi perdamaian dalam hal perceraian tapi setidaknya hal – hal yang disepakati di dalam mediasi harusnya di tuangkan dalam laporan mediasi ;
11.	Selama ini tanggal Laporan mediasi selalu bersamaan dengan bersamaan tanggal perintah untuk mediasi dari Majelis	Seharusnya tanggal laporan mediasi di bedakan tanggal dan harinya paling tidak selisih satu hari dari tanggal perintah mediasi dari majelis ;

E. Praptiningsih, SH., MH, Bidang Penerimaan Perkara dan Akte Cerai.

No.	TEMUAN	SEHARUSNYA
1.	<p>Akta Cerai Perkara yang terhambat penerbitan akta cerainya AL. : - 1733/Pdt.G/2018/PA.JB Atiah bt. Asan (P) Muhamad Ilham bin Hasyim (T).</p> <p>Putus tanggal 02-10-2018 PIP, bantuan ke PA. Jaksel., Pengiriman PIP tanggal 05-10-2018, berkas ke Meja III tanggal 05-10-2018. Sampai tanggal 09-11-2018 PIP Asli dari PA.Jaksel blm ada baru ada PIP via email. Penggugat sudah dating dan telpon 4x karena tahu Tergugat sudah terima PIP dari tanggal 10-10-2018, sehingga seharusnya sudah BHT.</p> <p>- 2135/Pdt.G/2016/PA.JB Putus tanggal 22-12-2016 PIP, bantuan ke PA. Cibinong., Pengiriman PIP tanggal 03-01-2017, Sampai saat ini tanggal 09-11-2018 blm ada pengembalian PIP dari PA.Cibinong.sudah dikirim surat permohonan tindak lanjut dari PA. Jakbar tanggal 29-10-2018 ke PA.Cibinong</p>	<p>Harus segera ditindak lanjuti oleh Panitera dengan meningkatkan koordinasi dengan PA. Jakel.</p> <p>Tingkatkan kordinasi dan monitor perkembangannya</p>
	<p>Penerimaan Perkara Tidak ada temuan yang berarti</p>	<p>Pada umumnya sudah berjalan sesuai SOP.</p>

F. Drs. H, Ubaidillah, M.Sy, Bidang Keuangan Perkara

NO	URAIAN	SEHARUSNYA
1.	Ketertiban Pembukuan Keuangan Perkara dalam Register Induk Keuangan Perkara, Buku Jurnal dan Buku Bendahara. Pada umumnya telah terbukukan dengan baik,.	Tidak Ditemukan masalah
2.	Laporan Keuangan Perkara Setiap Bulannya dan Laporan Penerimaan serta Pengeluaran PNBSP. Sudah dilaporkan sesuai jadwal pelaporan baik tentang penerimaannya maupun tentang pengeluarannya.	Tidak ditemukan masalah
3.	Ketertiban Pembukuan biaya proses. Sudah Terbukukan dengan rapih dan teratur.	Tidak ditemukan masalah
4.	Relaisasi Keuangan Biaya Prodeo dan Posbakum	Tidak ada temuan

<p>Biaya Perkara Prodeo yang dibiayai DIPA selama satu tahun dari 02 Januari s/d 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 16.640.000,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan bulan September 2018 telah terealisasi sejumlah Rp. 14.976.000 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Biaya Posbakum selama satu tahun dari 02 Januari s/d 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah). Ditangani oleh 3 (tiga) lembaga, yaitu Yayasan Lembaga Hukum Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Al-Mahkamah dan Perkumpulan Bantuan Hukum Nurani Universal. Sampai dengan bulan September 2018 telah terealisasi sejumlah Rp. 117.300.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah). Jumlah layanan selama 1 (satu) tahun 1560 jam layanan, 1 (satu) jam layanan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

G. Dr. Mustar, M.H., Bidang SIPP

NO	HASIL TEMUN	SEHARUSNYA
1	<p>Status Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PHS Terlambat 2 perkara; 2. Perkara belum Minutasi 6 perkara; 3. Perkara yang belum Pemberitahuan banding Bidang Gugatan 7 perkara; 4. Berkas banding belum dikirim 3 perkara; 5. PBT belum dikirim banding 1 perkara; 6. Perkara Permohonan belum minutasi 1 perkara; 7. 	SIPP diaktifkan untuk di input;
2	<p>Perkara yg belum in put dan minutasi Gugatan/Permohonan Perkara No. 21/Pdt.P/2018, No. 55/Pdt.P/2018, No. 89/Pdt.P/2018, No. 02/Pdt.P/2018, No. 39/Pdt.P/2018, No. 72/Pdt.P/2018, No. 789/Pdt.G/2018, No. 1231/Pdt.G/2018, No. 71/Pdt.P/2018, No. 1433/Pdt.G/2018, No. 1259/Pdt.G/2018, No. 1315/Pdt.G/2018, No. 1823/Pdt.G/2018, No. 1989/Pdt.G/2018, No. 2076/Pdt.G/2018, No. 1863/Pdt.G/2018, No. 155/Pdt.P/2018.</p>	Segera aplikasi SIPP diinput dan di Minut agar tidak kelihatan merah.
3	<p>Arsip Perkara di SIPP Arsip perkara di SIPP belum di In Put sehingga kelihatan di SIPP kosong;</p>	Perlu Input Arsip Perkara agar terbaca di SIPP
4	<p>Sisa Panjar Biaya perkara yang belum dikembalikan pada para pihak terlihat di SIPP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gugatan 1.897 perkara; 2. Permohonan 392 perkara; 	Migrasi dari SIADPA/SIPAJB ke SIPP belum dilaksanakan, segera bentuk tim untuk menginput ke SIPP agar tidak terlihat di SIPP;
5	<p>Tugas Juru Sita Belum memasukan tanggal memanggil ke SIPP sehingga aplikasi masih kosong;</p>	Perlu di in put ke SIPP setiap tanggal pemanggilan setiap perkara;
6	<p>Publikasi Putusan Masih banyak putusan yang belum di Publis ke SIPP khusus E-Doc Anonimisasi</p>	Perlu petugas khusus agar memasukan ke E-Doc Anonimisasi agar masuk ke Directory Putusan MARI

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada bapak sebagai bahan evaluasi dan penilaian bagi bapak

Terimakasih.

Wassalam,

Koordinator Bidang Pengawasan



Dr. H. Amam Fakhur, S.H., M.H